

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Dilihat dari segi geografis, Indonesia adalah negara yang kaya raya karena mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah. Sangatlah tidak masuk akal jika negara yang kaya raya ini mempunyai defisit anggaran yang sangat besar sehingga memaksa negara ini untuk berhutang jutaan dolar kepada IMF. Selain itu Indonesia juga mempunyai angka pengangguran yang sangat tinggi, sungguh tidak masuk akal tapi inilah keadaan sebenarnya.

Keadaan ekonomi yang mencekik memaksa puluhan ribu warga negara Indonesia untuk mengadu nasib di negara tetangga, khususnya Singapura. Alasan para tenaga kerja Indonesia untuk memilih mengadu nasib di negara singa ini dirasa cukup tepat. Karena negara ini termasuk salah satu negara maju, terutama di Asia Tenggara. Bagi mereka yang bernasib mujur, mereka dapat hidup bergelimangan harta dari hasil jerih payahnya itu. Tapi bagi mereka yang tidak bernasib mujur, mereka tidak mendapat apa-apa bahkan siksaan dan derita selalu menimpa mereka. Banyak juga para tenaga kerja Indonesia yang terpaksa mengakhiri hidupnya di negara tempat mereka bekerja.

Para tenaga kerja Indonesia wanita ini juga berjasa terhadap perekonomian Indonesia. Devisa yang mereka berikan cukup membuat

negara ini untuk tetap melangsungkan kehidupan. Maka itu, tidak ada

yang mereka terima tidaklah sebanding dengan jasa yang mereka berikan kepada negara Indonesia. Karena alasan tersebutlah maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "*Sikap Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah eksekusi TKI di Singapura*"

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Memberikan gambaran tentang sikap pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kematian TKI wanita dan masalah eksekusi TKI wanita di Singapura.
2. Sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Bersamaan dengan Sundarti, terdapat empat perempuan buruh migran asal Indonesia yang juga sedang menunggu nasib, yakni Purwanti Panji, Juminem, Siti Aminah, dan Sumiyati. Sumiyati didakwa membunuh anak kecil berusia 2 tahun pada 2003. Kasusnya dalam proses penyidikan polisi Singapura. Purwanti, Juminem, dan Siti Aminah juga dituduh membunuh majikannya.<sup>1</sup> Sepenggal kisah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa mengadu nasib di negara Singa justru mendatangkan resiko yang sangat besar walaupun tidak menutup kemungkinan bila bernasib baik akan memperoleh rejeki yang melimpah ruah.

---

<sup>1</sup> *Suara Pembaruan*, 9 Maret 2004.

Singapura, negeri yang berpenduduk 4,19 juta jiwa dengan pendapatan perkapita sekitar 23.000 dolar AS itu, makmur seperti pijar lampu di Asia Tenggara, yang mengundang buruh migran untuk mengadu nasib. Pertumbuhannya mencapai 7,3 % pada kuartal pertama tahun ini, sama dengan periode yang sama tahun lalu.<sup>2</sup>

Masyarakat Singapura memiliki disiplin tinggi, suka bekerja keras, menghargai hak asasi manusia, dan menghormati orang yang lebih tua. Masyarakat Singapura sebagian besar non Muslim. Masyarakat Singapura pada umumnya sibuk dengan pekerjaan/profesinya. Untuk melaksanakan pekerjaan rumat tangga, mereka memperkerjakan tenaga kerja dari negara lain termasuk Indonesia. Pada umumnya masyarakat Singapura menempati perumahan bertingkat (flat) yang menggunakan lift. Faktor tersebut merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang meninggal karena jatuh dari ketinggian tertentu di negara tersebut. Masyarakat Singapura patuh kepada peraturan yang berlaku, karena sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelanggar sangat berat yaitu berupa denda, hukuman penjara, hukuman cambuk dan juga hukuman gantung.

Koordinator Migrant Care, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Wahyu Susilo, menyebutkan bahwa jumlah buruh migran Indonesia di Singapura sangat banyak. Jumlah buruh migran Indonesia di Singapura sangat banyak. Jumlah buruh migran Indonesia di Singapura sangat banyak.

tangga ( PRT ), kini mencapai 70.000 orang. Mereka adalah bagian dari sekitar tiga juta buruh migran Indonesia yang menyumbang devisa sekitar Rp 23 triliun sehingga bisa disebut sebagai katup pengaman ekonomi di dalam negeri.

Hukum di Singapura sangat keras. Pasal 302 uu Hukum Pidana Republik Singapura menyebutkan secara tegas, "Barangsiapa terbukti melakukan pembunuhan akan dihukum dengan hukuman mati". Hukuman mati dilakukan dengan hukuman gantung. Selain pembunuhan, ada kejahatan kriminal lain yang dapat dijatuhi hukuman gantung, diantaranya yaitu kasus narkoba. Masyarakat Singapura dikontrol sangat ketat. Orang bisa dipenjarakan karena agama yang mereka anut atau pendapat politik mereka. Meskipun begitu, Pemerintah Singapura tidak pernah menyebutkan mengenai data statistik tentang pelaksanaan eksekusi di Singapura. Pemerintah Singapura juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka merahasiakan rencana-rencananya.<sup>3</sup> Jadi bisa saja ada terpidana mati yang tidak diketahui jelas sebab musababnya, sehingga pada akhirnya masyarakat tidak mengetahui betapa seriusnya masalah eksekusi itu.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Bagaimana sikap pemerintah Indonesia dalam menangani masalah eksekusi TKI di Singapura?

## **E. Kerangka Pemikiran**

### *1. Teori Pembuatan Keputusan ( Decision-Making Theories )*

#### *1.1. Analisis Pembuatan Keputusan : Bentuk dan Asal Mula*

Keputusan adalah, dalam istilah David Easton, "*output*" ( keluaran/hasil ) sistem politik, yang dengan sistem itu nilai-nilai dialokasikan dalam masyarakat secara otoritatif ( dengan penuh kekuasaan ). Konsep pembuatan keputusan telah termuat secara implisit dalam beberapa pendekatan kuno pada sejarah diplomasi dan studi tentang institusi politik. Studi tentang bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat pada mulanya menjadi subyek penelitian sistematis bidang lain selain ilmu politik. Para psikolog tertarik pada motif-motif yang mendasari keputusan individual dan mengapa sebagian orang mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain dalam membuat keputusan. Para ahli ekonomi memfokuskan pada keputusan yang diambil para produsen, konsumen, investor, dan mereka-mereka yang pilihannya mempengaruhi perekonomian. Para teoritis administrasi bisnis berusaha menganalisis dan meningkatkan efisiensi pembuatan keputusan eksekutif. Dalam pemerintahan dan khususnya dalam perencanaan pertahanan pada tahun 1960-an, teknik yang secara luas dikenal sebagai "*cost effectiveness*" ( keefektifan biaya ) digunakan dalam proses pembuatan keputusan, termasuk dalam pembelian sistem persenjataan baru. Pembuatan keputusan merupakan fokus perhatian para ilmuwan politik yang tertarik pada analisis perilaku keputusan para pemberi suara, legislator, pejabat eksekutif, politikus, pemimpin kelompok

kepentingan, dan aktor-aktor lain dalam arena politik.<sup>4</sup> Karenanya, studi tentang pembuatan keputusan politik luar negeri mengkonsentrasikan pada satu segmen dari sebuah fenomena minat yang lebih luas bagi para ilmuwan sosial dan pembuat keputusan. Karena banyak analis memfokuskan perhatian mereka pada pembuatan keputusan dalam situasi krisis.

*Decision-making* adalah "simply the act of choosing among available alternatives about which uncertainty exists" (sekedar tindakan memilih alternatif yang tersedia yang di situ terdapat ketidakpastian). Dalam politik luar negeri--karena wilayah politik luar negeri biasanya kurang dikenal--jarang terdapat alternatif kebijakan yang sudah pasti. Alternatif-alternatif tersebut sering terpaksa dirumuskan dengan meraba-raba dalam sebuah konteks dari situasi yang mana yang paling valid, pilihan-pilihan apa yang ada, konsekuensi yang mungkin muncul dari berbagai pilihan, dan nilai-nilai yang harus digunakan sebagai kriteria untuk membuat ranking pilihan dari yang paling dikehendaki sampai yang paling dihindari. Terdapat kontroversi terhadap hakekat proses pembuatan dan terhadap paradigma yang sesuai bagi studi ini. Pada generasi terakhir, perhatian telah bergeser dari pembuatan keputusan sebagai sekedar pilihan abstrak dari alternatif yang paling mungkin bisa digunakan kepada sebuah "incremental process containing partial choices and compromises among competing organizational interest and bureaucratic pressures" (proses bertahap yang mengandung pilihan atas satu

---

<sup>4</sup> Lihat Paul Wasserman dan Fred S. Silander, *Decision-Making : An Annotated Bibliography* (Ithaca, NY: Cornell School of Public Administration, 1970).

dengan yang lain dan kompromi di antara persaingan kepentingan organisasi dan tekanan birokratik ).<sup>5</sup>

### 1.2. *Beberapa Pendekatan Terhadap Teori Decision-Making*

Pendekatan *decision-making* untuk memahami politik internasional bukan merupakan barang baru. Dua puluh empat abad yang lalu sejarawan Yunani Thucydides, dalam karyanya *Peloponesian War*, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan para pemimpin negara-negara kota Yunani memutuskan dengan tepat masalah perang dan damai, juga aliansi kekaisaran, di bawah situasi yang dihadapi mereka. Thucydides tidak hanya memusatkan perhatian pada alasan-alasan yang secara sadar dipilih para negarawan beserta persepsi mereka terhadap lingkungan sistem--keduanya tercermin dari pidato-pidato yang mereka ucapkan--tetapi juga pada kekuatan-kekuatan psikologis yang lebih dalam seperti ketakutan, kehormatan, dan kepentingan yang dalam berbagai kombinasinya mendorong para negarawan tersebut sebagai individual dan menciptakan keadaan tertentu dari masyarakatnya. Jadi, Thucydides merupakan orang pertama yang mempelajari *decision-making*.

Teori pembuatan keputusan, sebagai fokus bab ini, mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan, dan menyarankan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Teori pembuatan keputusan menandai pegeseran penting dari analisis politik tradisional dimana para penulis gampang terjebak untuk menjadikan atau

<sup>5</sup> Hermann Dehler, editerjemahkan: *Teori Teori Hubungan Internasional*, Jember: FEB 1996

mempersonifikasikan negara-negara sebagai aktor pokok dalam sistem internasional. Ia mengarahkan perhatiannya secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi yang luas yang disebut 'eksekutif', melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah. Sebagaimana Richard Snyder, H.W.Bruck, dan Burton Sapin mengatakannya : "Merupakan salah satu dari pilihan-pilihan metodologis pokok kita untuk menetapkan batasan negara pada para pembuat keputusannya--yaitu mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya, adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara."<sup>6</sup> Dengan mempersempit obyek penelitian dari sebuah kolektifitas yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan, para teoritis decision-making berharap membuat sasaran analisis politik lebih konkrit dan lebih tepat, dan dengan demikian lebih mudah diarahkan pada analisis sistematis. Meskipun demikian diasumsikan bahwa para pembuat keputusan bertindak dalam lingkungan menyeluruh yang mereka ketahui yang mencakup sistem politik nasional mereka maupun sistem internasional secara keseluruhan--lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Persepsi diberi tempat sentral dalam teori decision-making. Ketika berurusan dengan "definisi situasi," sebagian besar teoritis decision-making

---

<sup>6</sup> "Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics", dalam Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin, *Decision-Making in International Politics*.

menganggap dunia sebagaimana dilihat oleh para pembuat keputusan lebih penting dari pada kenyataan obyektif.<sup>7</sup> Karena itu mereka menerima perbedaan yang dibuat oleh Harold Sprout dan Margaret Sprout antara "*psychomilieu*" ( lingkungan psikologis ) dan "lingkungan operasional". Meskipun demikian, Joseph Frankel berpendapat bahwa teori decision making harus memperhitungkan lingkungan obyektif, karena meskipun faktor-faktor yang tidak terdapat dalam pikiran para pembuat keputusan tidak bisa mempengaruhi pilihan-pilihan mereka, faktor-faktor tersebut bisa menjadi penting sepanjang mereka bisa menciptakan batas terhadap hasil keputusan.<sup>8</sup> Begitu pula, Michael Brecher menekankan bahwa "lingkungan operasional mempengaruhi hasil keputusan secara langsung tetapi hanya mempengaruhi pilihan di antara pilihan-pilihan kebijakan, yaitu, keputusan itu sendiri, sebagaimana ia disaring melalui citra para pembuat keputusan."<sup>9</sup>

### 1.3. *Situasi (Peristiwa) Keputusan*

Braybrooke dan Lindblom mengemukakan bahwa pembuatan keputusan, meskipun tidak bisa diidentifikasi sepenuhnya dengan pemecahan masalah rasional, bagaimanapun bisa secara umum disamakan dengannya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana para pembuat keputusan mendefinisikan situasi dalam hubungannya dengan

---

<sup>7</sup> Ibid., p. 65. Lihat juga Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* (Princeton : Princeton University Press, 1976 ).

<sup>8</sup> Joseph Frankel, *The Making of Foreign Policy: An Analysis of Decision-Making* ( New York: Oxford University Press, 1972), p. 4.

masalah yang dihadapi. Bagaimana mereka melihat obyek, kondisi, aktor-aktor lain, dan maksud-maksud mereka? Bagaimana mereka mendefinisikan tujuan pemerintah mereka sendiri? Nilai-nilai apa yang paling mendasari mereka, tidak dalam bentuk abstrak tetapi sebagaimana mereka muncul dalam situasi tertentu?<sup>10</sup>

Snyder mengkaji bahwa beberapa situasi lebih terstruktur dibandingkan dengan yang lain. Beberapa di antaranya dengan mudah ditangkap maksudnya, sedangkan yang lain lebih mengambang dan mendua arti. Situasi-situasi yang mendesak, atau tekanan untuk mengambil tindakan, juga akan sangat berbeda-beda. Apakah sebuah masalah dianggap terutama sebagai masalah politik, ekonomi, militer, sosial, atau budaya tetap akan mempunyai implikasi tentang bagaimana harus diselesaikan dan oleh siapa harus diselesaikan. Oleh karena itu, ditengah banyaknya pendapat dari para diplomat profesional, ilmuwan, wartawan, dan ada yang lain, sulit untuk mencapai perhitungan atau perkiraan yang akurat terhadap berbagai kecenderungan dan kekuatan-kekuatan yang aktif dalam sebuah situasi luar negeri ( dan disini pembuatan keputusan politik luar negeri mungkin jauh lebih rumit dari pada pembuatan keputusan politik dalam negeri ). Menganalisa maksud negara lain bahkan bisa menjadi sangat berbahaya. Para pembuat keputusan di suatu negara, dengan maksud mengantisipasi inisiatif politik lawannya di negara lain, bisa menganggap tindakan mereka untuk

---

<sup>10</sup> Harvey D. Deblan, editor terjemahan: *Tawar Tawar: Hubungan Internasional* (Jember: FEB FEB 1994)

menghalangi atau menghindari semata-mata sebagai respon defesif saja, tetapi tindakan tersebut bisa dilihat negara lain sebagai tindakan *ofensif*.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut kita bisa menganalisis bagaimana sikap pemerintah Indonesia dalam menangani masalah eksekusi TKI wanita di Singapura. Masalah utama bagi Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Selain itu masalah pengangguran juga menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Masalah eksekusi lima TKI wanita tersebut seharusnya menjadi masalah yang serius bagi Pemerintah Indonesia karena merekalah Indonesia memperoleh devisa milyaran dollar AS.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikannya tanpa mengganggu hubungan diplomatiknya dengan Singapura. Apalagi sampai harus menarik semua tenaga kerja Indonesia yang ada di Singapura, sangat tidak mungkin karena jumlah pengangguran di Indonesia akan sangat besar. Oleh karena itu upaya yang mungkin dilakukan adalah upaya diplomasi damai dan perlindungan hukum bagi para TKI wanita yang sedang menghadapi vonis hukuman mati. Dan jika semua upaya tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menyerahkannya pada proses hukum yang berlaku di Singapura, agar hubungan diplomatiknya tidak terganggu.

TKI wanita di Singapura sebagian besar adalah tenaga kerja wanita yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. TKI di Singapura hanya

sebagian kecil dari seluruh jumlah buruh migrant yang ada di luar negeri. Karena jasa merekalah Indonesia bisa mendapatkan devisa yang melimpah ruah.

Tapi ternyata pengiriman TKI keluar negeri mendatangkan sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu beban pemerintah Indonesia untuk memperluas lapangan kerja menjadi berkurang, karena sebagian warga negara Indonesia telah mencari pekerjaan keluar negeri. Selain itu sumber devisa yang diperoleh Indonesia menjadi bertambah. Sedangkan sisi negatifnya yaitu dengan adanya pengiriman tenaga kerja keluar negeri justru menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri biasanya masalah pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Masalah-tersebutlah yang sering dialami oleh sebagian pembantu rumah tangga asal Indonesia di Singapura. Bahkan banyak juga diantara mereka yang tidak digaji.

Tenaga kerja yang dikirimkan keluar negeri pada umumnya hanya lulusan SD, SLTP, SLTA, dan lulusan perguruan tinggi, tapi hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu mereka masih miskin terhadap penguasaan ilmu dan teknologi serta tidak menguasai masalah hukum, hak dan kewajiban. Mereka hanya tahu bagaimana caranya agar mendapat uang yang banyak untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yang berada di tanah air. Sedangkan masyarakat luar negeri lebih modern dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat disana telah memanfaatkan kemajuan

teknologi. Padahal masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memanfaatkan kemajuan teknologi.

negeri masih asing terhadap barang-barang teknologi dan juga rendahnya penguasaan terhadap bahasa asing.

Kurangnya potensi yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia diluar negeri itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Wajar saja jika majikan mereka stres karena pembantunya tidak bisa mengoperasikan peralatan rumah tangga yang mereka miliki. Majikan mereka juga telah berusaha memberitahu bagaimana caranya mengoperasikan semua peralatan yang mereka miliki, tetapi para pembantu mereka yang notabene berasal dari Indonesia, tidak bisa mengerti bahasa yang dipakai oleh majikan mereka. Sehingga ujung-ujungnya berakhir penganiayaan, pemerkosaan, tidak digaji, bahkan pembunuhan.

Selain karena alasan tersebut diatas, kematian para tenaga kerja Indonesia di Singapura kebanyakan karena jatuh dari apartemen. Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat Singapura kebanyakan tinggal di apartemen bertingkat. Kebanyakan mereka meninggal ketika mereka harus membersihkan kaca jendela dari luar dan ketika menjemur pakaian dengan galah bambu yang dikaitkan diantara pipa-pipa dibawah jendela. Dan mereka melakukan semua itu tanpa menggunakan alat pengaman yang memadai.

Selain itu, tubuh orang Indonesia pada umumnya kecil, tingginya rata-rata sekitar 150 cm dan sangat berbahaya jika melakukan pekerjaan semacam itu. Mungkin bagi masyarakat Singapura pekerjaan semacam itu bukanlah hal yang membahayakan dan bisa dilakukan dengan mudah. Tapi bagi tenaga

kerja Indonesia pekerjaan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan

mereka harus menggunakan kursi sebagai tumpuan, dan akhirnya mereka jatuh dari ketinggian tertentu. Seharusnya majikan mereka melarang para pembantunya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Dari tahun 1999-2004 sudah 100 orang tenaga kerja Indonesia tewas karena jatuh dari apartemen. Website Kementrian Tenaga Kerja Singapura ( *Minister of Manpower / MOM* ) bahkan tidak menyediakan data tersebut. Kepolisian Singapura mengatakan bahwa mereka tewas karena bunuh diri. Tetapi apakah mungkin mereka melakukan tindakan bodoh tersebut? Sedangkan bunuh diri bukanlah merupakan budaya masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia menduga bahwa mereka jatuh ketika membersihkan kaca jendela dan menjemur pakaian.<sup>12</sup>

Selain itu, selama lima tahun terakhir sudah 10 orang tenaga kerja Indonesia di Singapura diancam hukuman berat. Lima diantara mereka diancam hukuman mati dengan tuduhan berlapis. Sedangkan kasus terberat dialami oleh Sundarti Supriyanto, wanita yang berasal dari Desa Mangge, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, karena dituduh melakukan tindakan pembunuhan terhadap majikan dan anak majikannya, mencuri barang majikannya, membakar kantor majikannya, dan mencuri uang majikannya melalui ATM. Tetapi tuduhan yang diberikan kepada lima tenaga kerja wanita tersebut belum terbukti kebenarannya, bahkan kepolisian Singapura tidak menyediakan bukti-buktinya. Laporan tersebut terdapat di <http://www.kompas.com>

akan mereka dipojokkan dalam kasus tersebut. Oleh karenanya pemerintah harus turun tangan dalam masalah tersebut.<sup>13</sup>

Kita juga tahu bahwa pemerintah Indonesia juga telah berusaha menyelamatkan nasib para tenaga kerja Indonesia yang sedang terancam hukuman mati. Misalnya, duta besar Indonesia untuk Singapura, M Slamet Hidayat, telah mengupayakan diplomasi untuk menyelamatkan nasib para tenaga kerja Indonesia tapi kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada hukum di Singapura.<sup>14</sup> Mungkin pemerintah Indonesia berpikir jika pemerintah Indonesia tetap bersikeras menentang hukum di Singapura, maka hubungan antara Indonesia dengan Singapura akan menjadi retak seperti yang dialami oleh hubungan Filipina dengan Singapura yang retak gara-gara pemerintah Filipina berusaha keras untuk memperjuangkan nasib Flor Contemplacion.

Dalam hal ini pemerintah Filipina mempunyai alasan yang kuat bahwa Flor Contemplacion tidak bersalah. Empat tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati tersebut masih punya harapan untuk bebas dari hukuman karena mereka masih dalam tahap pemeriksaan di kepolisian. Pemerintah Indonesia bisa membantu mencari bukti-bukti baru melalui cara konseling, karena dengan cara itu para TKI akan lebih terbuka menceritakan kasusnya. Sayangnya instansi pemerintah yang tidak memiliki kebulatan sikap menghadapi kasus ini. Deplu, Depnaker, dan Menko Kesra membentuk

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 9 Maret 2004.

<sup>14</sup> *Koran Tempo*, 12 Maret 2004.

tim sendiri-sendiri. Meskipun hal ini menunjukkan perhatian pemerintah, itu hanya akan membuang-buang uang dan tidak akan efektif. Dan akhirnya pemerintah memilih menyerahkan sepenuhnya kepada hukum di Singapura, seperti yang dikatakan M Slamet Hidayat. Selain upaya diplomasi--walaupun banyak kalangan yang menilai bahwa diplomasi yang dilakukan pemerintah terlalu lembek--yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum dengan menyewa pengacara untuk membantu para tenaga kerja wanita dalam menghadapi kasus tersebut.<sup>15</sup>

Selama dua tahun terakhir sudah lima buruh migran Indonesia yang harus menghadapi ancaman hukuman mati lantaran dituduh membunuh. Banyak buruh migran diperlakukan semena-mena oleh majikannya, sehingga berbuntut tindakan pembunuhan. Pemerintah juga sempat berencana untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Tetapi pemerintah harus berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut, karena rencana tersebut dapat menghilangkan sumber devisa yang begitu besar dan menambah besar jumlah pengangguran di Indonesia.

## **F. Hipotesa**

Sikap pemerintah Indonesia dalam menangani masalah eksekusi TKI di Singapura yaitu :

1. Mengupayakan jalur diplomasi dengan pemerintah Singapura.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada TKI di Singapura yang bermasalah.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dan tidak mengena pada sasaran yang hendak dicapai maka penulis memberikan batasan. Dalam menganalisis masalah ini maka penulis akan membatasi penelitian dari tahun 1999-2004.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini yakni dengan penelitian, mencari data dari perpustakaan, dari media cetak, media

## **I. Sistematika Penulisan**

**Bab I** : Berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** : Profil Umum Negara Singapura

**Bab III** : Fenomena TKI di Singapura

**Bab IV** : Sikap Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah TKI